

Analisis Kebijakan *Smart City* Pada Among Tani untuk Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Mewujudkan *Good Governance*

Bewa Dangu Wole^{1*}, Anisa Purwaningsih², Cahyo Sasmito³

¹Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang, Indonesia, email: bewadanguwole@gmail.com

²Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang, Indonesia, email: annisa.pn97@gmail.com

³Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang, Indonesia, email: Cahyosasmito1970@gmail.com

*Koresponden Penulis

Info Artikel

Submit: 05 Jan 2021

Accepted: 04 Mar 2021

Publish: 23 Mar 2021

Keywords:

Smart City; Community Participation; Good Governance

Kata Kunci:

Smart City; Partisipasi Masyarakat; Good Governance



Lisensi: cc-by-sa

Abstract

To realize good governance is inseparable from community participation, the government initiated a concept of smart city implementation. Smart city is a form of structuring and managing the City using technology-based resources. Batu City Government, the term smart city was changed to Batu Among Tani Teknologi. The purpose of the research is to analyze smart city policies in Among Tani to increase community participation in order to realize good governance in batu city government, to know the supporting factors and inhibitions and to know the smart city policy analysis model. The method in this research is qualitative research approach of literature study using secondary data derived from books, journals, and other scientific critical studies coming from institutions according to the focus of research topics. The results of the research obtained are the application among farmers in Batu city community participation is increasing because farmers can market agricultural products and survive the practice of middlemen, consult and report complaints on the application Among Farmers and also farmers empowered through farmer groups. Not only farmers who use the application, the general public as buyers have also used Among Tani. The supporting factor of smart city policy in Among Tani is the organization of farmers who are empowered in farmer groups so that the needs of the people of Batu city the results of agriculture are fulfilled. The inhibition factor is the lack of evenly distributed socialization of the government so that there are still many people who do not understand what smart city is and the presence of farmers lose the motivation of farming that results in agricultural land being switched because of the lack of protection from the government.

Abstrak

Untuk mewujudkan good governance tidak terlepas dari partisipasi masyarakat, maka pemerintah menggagas sebuah konsep penerapan smart city. Smart city merupakan sebuah bentuk penataan dan pengelolaan Kota menggunakan sumber daya yang berbasis teknologi. Pemerintah Kota Batu, istilah smart city diganti menjadi Batu Among Tani Teknologi. Tujuan penelitian untuk menganalisis kebijakan smart city pada Among Tani untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan good governance dipemerintahan Kota Batu, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat serta untuk mengetahui model analisis kebijakan smart city. Metode pada Penelitian ini adalah penelitian kualitatif pendekatan studi literatur dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, dan kajian kritis ilmiah lainnya

yang berasal dari instansi sesuai fokus topik penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu adanya aplikasi Among Tani di Kota Batu partisipasi masyarakat semakin meningkat karena petani bisa memasarkan hasil pertanian dan selamat dari praktik tengkulak, berkonsultasi serta melaporkan keluhan pada aplikasi Among Tani dan juga petani diberdayakan melalui kelompok tani. Tidak hanya petani yang menggunakan aplikasi tersebut, masyarakat umum sebagai pembeli juga telah menggunakan Among Tani. Faktor pendukung kebijakan smart city pada Among Tani adalah terorganisirnya petani yang diberdayakan dalam kelompok tani sehingga kebutuhan masyarakat kota Batu hasil dari pertanian tercukupi. Faktor penghambat kurang meratanya sosialisasi pemerintah sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahami apa itu smart city dan adanya petani kehilangan motivasi bertani yang mengakibatkan lahan pertanian dialih fungsikan karena kurangnya perlindungan dari pemerintah.

PENDAHULUAN

Menurut data Menkominfo (2017) internet (*interconnection networking*) telah menjadi bagian dari kehidupan sehingga mampu mempermudah setiap aspek kehidupan manusia. Ditengah cepatnya laju perkembangan teknologi, berbagai kota diseluruh penjuru dunia berlomba-lomba untuk menjadi yang tercepat dan terbaik dalam implementasi *smart city*. Tentu saja yang menjadi tujuan utama adalah untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan dan mendukung peningkatan kualitas hidup warga. Namun, lebih jauh kota-kota tersebut juga terus bersaing demi menyandang predikat atau penghargaan sebagai *smart city* atau Kota Pintar.

Menurut Insani (2017) *smart city* merupakan sebuah konsep untuk memperbaiki tatanan kehidupan sosial, politik, ekonomi dan pemerintahan perkotaan baik dengan memanfaatkan teknologi maupun tidak. Untuk menciptakan strategi-strategi yang terbaru tentu harus bertransformasi dalam birokrasi melalui setiap kota karena kota memiliki keunggulan mulai dari kuantitas penduduk, infastruktur, tatanan masyarakat, dan teknologi (Rohayatin, 2017). Oleh karena itu, dalam memanfaatkan teknologi akan menjadi jawaban dalam melakukan pelayanan publik untuk memperoleh informasi, sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memiliki peran yang sangat penting.

Jumlah provinsi di Indonesia 34, namun yang terlibat dalam menggunakan dan menerapkan *e-government* 33 provinsi. Dari total Provinsi tersebut telah dinilai dari segi penerapan dan pengembangan *e-government*, dan berdasarkan penilaian PeGi (Pemeringkatan *e-Government* Indonesia) terdapat 10 Provinsi yang mewakili tingkat nasional, dimana Provinsi Jawa Timur menempati urutan ketiga dengan poin 3,01. Hasil tersebut menunjukkan Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi yang mengimplementasikan *e-Government* dengan baik dan mendapat dukungan dari masyarakat sebagai pengguna layanan, karena target utama untuk melaksanakan layanan *e-Government* adalah masyarakat. Dan juga pemanfaatan teknologi disetiap kota melalui penerapan *smart city* menjadi suatu terobosan baru untuk pelayanan publik yang lebih baik (Widodo, 2016; Azkiya, 2018).

Saat ini setiap Kota bersama-sama melaksanakan penerapan *smart city* dalam pemanfaatan teknologi guna mencapai pelayanan publik demi kepentingan masyarakat luas. Pada tahun 2017 Pemerintah Kota Batu menyiapkan anggaran sepuluh milyar untuk pengadaan sarana prasarana berupa komputer dan sebagainya, namun banyak masyarakat yang menantikan program itu bisa terwujud sesuai dengan waktu yang dijanjikan oleh Pemerintah, disisi lain program tersebut mengalami banyak kendala seperti: keterlambatan finalisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), membutuhkan waktu lama

saat pergantian nama dari *smart city* menjadi Batu Among Tani Teknologi (BATT), hingga kelengkapan data dan barang penunjang lainnya yang terbilang lama. Ketidakterbukaan pemerintah pada masyarakat akan menimbulkan masalah baru yaitu dukungan masyarakat yang kurang.

Dari semua perencanaan pemerintah harus transparan dan mensosialisasikan agar kesiapan masyarakat ikut berpartisipasi. Sebagian besar masyarakat Kota Batu adalah petani sehingga keterlibatan petani harus bisa terlayani dengan baik sehingga petani bisa sejahtera dan makmur untuk mendukung *smart city* dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Walaupun implementasi *smart city* dilaksanakan dengan baik, masih banyak kendala yang dialami oleh pengguna portal *web* khususnya masyarakat dalam bentuk cara menggunakan aplikasi, kurang proaktif dan pemahaman tentang *smart city* masih kurang.

Kota Batu memiliki Perwali Kota Nomor 78 Tahun 2017 Tentang *Masterplan Smart City*. Dengan adanya regulasi tersebut Kota Batu telah menjadi *rolemodel smart city* dan telah terdaftar dalam 25 Kota paling *smart* di Indonesia dalam penerapannya di tahun 2020. Kota Batu memiliki tiga aplikasi andalan yang sudah dipublikasikan untuk masyarakat dan pihak-pihak lain di Kota Batu. Menurut (Raffi et al., n.d. 2020) menyatakan bahwa Tiga aplikasi yang ada di Kota Batu adalah Among Tani, Among Warga dan Among Kota yang memiliki fungsi masing-masing dan semuanya adalah program *smart city*.

Khususnya Kota Batu sektor pertanian dan pariwisata tergolong unggul, tapi pemerataan infastruktur untuk memperkuat jaringan internet ke pedesaan dan daerah-daerah yang belum terjangkau masih kurang. Penerapan *smart city* tentu tidak akan berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh dukungan institusi pemerintah yang terintegrasi, hubungan antar-instansi pemerintah dan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi. Tidak adanya standarisasi infastruktur juga menjadi kendala karena penerapan *smart city* ini berbasis internet sehingga membutuhkan kekuatan koneksi jaringan di masing-masing daerah. Pengetahuan dan kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan *smart city* masih kurang dalam keterlibatan menerima informasi pemerintahan atau sumber informasi yang mereka butuhkan karena keakuratan data penyedia layanan belum merata di Kota Batu.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka diperlukan pendekatan untuk menganalisis proses berjalannya kebijakan *smart city* khususnya Among Tani sehingga peneliti menjadikan fokus penelitian.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur atau studi kepustakaan. Dimana data yang digunakan data sekunder yang berasal dari penelitian terdahulu, dan laporan hasil penelitian dari instansi serta kajian kritis ilmiah lainnya yang berasal dari suatu instansi sesuai fokus topik penelitian. Pada tahap awal akan dilakukan pengumpulan data dan tahap selanjutnya mengelompokkan atau mengorganisasikan data. Nantinya sebelum semua data di analisis, peneliti juga akan melakukan batasan tahun dalam pengambilan sumber dengan minimal sepuluh tahun kebelakang mulai penelitian ini dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kebijakan *Smart City* Pada Among Tani

a. Pendekatan Proses

Penerapan *smart city* Kota Batu merupakan salah satu konsep yang disediakan untuk melakukan pelayanan publik yang berbasis teknologi menjawab

setiap kesulitan atau persoalan yang dialami masyarakat. Semenjak *smart city* diterapkan banyak masalah sosial yang eksis ke publik karena adanya peran jaringan sehingga mudah terekspos ke media dan mendapat perhatian dari pemerintah disertai tuntutan dari masyarakat yang dijadikan masalah sosial sebagai masalah kebijakan lalu dijadikan suatu kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Kesadaran masyarakat petani Kota Batu akan pentingnya penggunaan teknologi masih kurang, hal tersebut dapat dibuktikan dari total 17.005 petani laki-laki yang menggunakan internet berjumlah 5.486 dan yang tidak menggunakan internet berjumlah 11.519 (BPS Jatim, 2019). Hal ini menjadi suatu masalah yang terjadi yang harus diatasi Pemerintah Kota Batu. Oleh karena itu, adanya Among Tani sebagai kebijakan *smart city* bentuk pengejawantahan laporan petani terkait masalah pertanian.

Petani yang tergabung dalam kelompok tani adalah pelaku kebijakan di bidang pertanian dan juga telah aktif dalam kegiatan sosial dengan tujuan untuk keluar dari ketidakberdayaan secara kolektif yang diperankan oleh setiap individu. Menurut Noor (2011) dalam penelitiannya menjelaskan salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah upaya memperjuangkan ketidakberdayaan dimulai dari kalangan bawah supaya harkat dan martabatnya sebagai individu bagian dari kelompok dapat meningkat untuk bangkit dari keadaan miskin, kebodohan, dan ketertinggalan sehingga nantinya bukan hanya individu saja yang diperkuat tetapi akan memperkuat lembaga sosial.

Hasil pertanian dijual melalui Among Tani dan bisa bertransaksi langsung dengan pembeli secara online, dengan pengalaman transaksi tersebut menjadi pengalaman dan pelajaran bagi masyarakat petani sehingga mampu memperoleh pengetahuan baru dalam berwirausaha. Dengan pengetahuan yang berasal dari pengalaman petani tersebut akhirnya banyak petani kota Batu yang menggunakan internet untuk meningkatkan pendapatan sesuai keterampilan yang ia miliki. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rejeki dan Yusup, (2020) menunjukkan bahwa membaca online yang dilakukan ibu rumah tangga dapat memperkuat motivasi berwirausaha, meningkatnya keterampilan mengolah produk, dan memperoleh keterampilan memasarkan produk.

Among Tani dalam prosesnya sebagai produk *smart city* merupakan jawaban dari masalah-masalah yang dialami petani, dan partisipasi masyarakat khususnya petani semakin meningkat karena bermanfaat di bidang ekonomi dan pertanian bagi dirinya-sendiri dan kelompok sosialnya. Masyarakat petani memanfaatkan *smart city* adalah bagian dari partisipasi, walaupun masih ada masyarakat yang belum mengetahui apa itu *smart city*. Namun, mereka dalam kegiatan sosial melalui kelompok tani dan kelompok sosial lainnya cukup aktif keterlibatannya sebagai tempat proses belajar berbagi ide dan gagasan.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kota Batu memiliki Peraturan Walikota Batu Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut sebagai bentuk pemerintahan yang transparan dengan sistem infomasi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Maka Kota Batu dalam akuntabilitas hukum dan peraturan, akuntabilitas program, akuntabilitas anggaran, dilakukan melalui *website* <https://batukota.go.id> yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat kota Batu.

Berdasarkan pendekatan proses dalam penelitian ini, terwujudnya *good governance* di Pemerintahan Kota Batu dapat dilihat dari salah satu prinsip seperti adanya transparansi kebijakan yang diinformasikan melalui akun media sosial (*facebook, whatsapp, instagram*), melibatkan *stakeholder* dan tim penyuluh. Penggunaan Among Tani sebagai wadah untuk pihak yang memiliki kepentingan di pertanian dan khususnya petani dalam partisipasinya sudah efektif karena bukan hanya partisipasi pada aplikasi tapi partisipasinya dalam kelompok tani, kelompok sadar wisata, dan kelompok sosial lainnya. Setiap informasi yang diperoleh petani didengar atau didiskusikan kebijakan yang ada di bidang pertanian dalam kelompok tani tersebut. Disisi lain Pemerintah Dinas Pertanian bekerja sama dengan tim penyuluh dan pihak lainnya untuk sosialisasi ke masyarakat dan juga melibatkan *stakeholder*.

Berdasarkan penjelasan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Maryam (2016) menjelaskan bahwa dalam suatu pemerintahan yang menyelenggarakan *good governance* sebenarnya harus melakukan suatu tindakan untuk melibatkan semua pihak yang punya kepentingan mulai dari lingkungan birokrasi, lingkungan masyarakat, dan dalam suatu pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemkot Batu dalam memberi kebijakan *smart city* untuk petani telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya among tani adalah jawaban dari keluhan petani sebelumnya dan untuk menjawab keluhan masyarakat saat ini melalui aplikasi dan kelompok tani yang terorganisir dan kelompok sosial lainnya.

b. Pendekatan Partisipasi

Peranan masyarakat sangat penting menuju pembangunan yang berkelanjutan, agar masyarakat dapat terorganisir maka pemerintah harus melakukan pemberdayaan atau memberi kekuatan pada masyarakat supaya menciptakan kebijakan yang sifatnya *bottom up* melalui aktifnya masyarakat dalam kegiatan sosial. Kebijakan *smart city* Kota Batu di bidang pertanian benar-benar sesuai kondisi masyarakat yang mengharapkan hadirnya pemerintah mengatasi keluhan tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Among Tani sehingga petani dapat sejahtera di bidang ekonomi melalui transaksi *online*.

Menurut Hamid (2018) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat membutuhkan partisipasi setiap individu namun sifatnya bukan hanya kepentingan individu yang diutamakan melainkan kepentingan masyarakat melalui kelompoklah yang paling penting sebagai tempat eksisnya setiap individu yang teraktualisasi. Pemerintah Kota Batu lebih mengutamakan kepentingan kelompok, hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kelompok tani. Sehingga kebijakan-kebijakan mengarah pada kepentingan kelompok dibandingkan individu karena melalui kelompok tani setiap individu bisa eksis melaporkan keluhan berdasarkan pengetahuan yang ia peroleh dari kelompok tani atau kelompok sosial lainnya. Petani yang melaporkan keluhan di Among Tani secara individu akan ditindaklanjuti oleh dinas terkait sesuai tingkat *urgensi* laporan tersebut.

Pemerintah dibantu oleh *stakeholder* memberikan informasi tentang kondisi masyarakat petani dengan cara musyawarah dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dimana penyuluh pertanian dan pihak pemerintah terkait ikut terlibat. Karena sebelum Pemerintah Kota Batu *smart* maka masyarakat harus menjadi *smart people* dulu supaya peran masyarakat tidak sebatas peran yang pasif yang hanya menunggu kebijakan pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan penelitian

Faidat & Khozin (2018) yang menyatakan bahwa untuk menerapkan *smart city* yang menjadi penunjang utama adalah warga Yogyakarta yang menjadi *smart people*. Berdasarkan penjelasan tersebut, masyarakat Kota Batu telah terorganisir dalam bentuk kelompok-kelompok sosial masyarakat sesuai dengan kebutuhan dalam bidang usaha, petani, bisnis, peduli lingkungan dan lain sebagainya. Kesempatannya untuk menjadi *smart people* perlahan-lahan akan terwujud melalui proses belajarnya dalam kelompok organisasi tersebut, mendiskusikan suatu rencana atau ikut menyumbang ide-ide dalam berorganisasi sudah termasuk ikut berpartisipasi agar tercapainya tujuan bersama dalam kelompok-kelompok masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Handy (2017) yang mendapatkan hasil penelitian yaitu keenam indikator seperti *smart economy, smart mobility, smart living, smart people, smart environment, dan smart governance*, yang menjadi landasan utama dalam penerapan konsep *smart city* adalah *smart people*. Karena sesuai dengan pengertian adaptasi yang merupakan usaha yang dilakukan oleh individu untuk terlibat secara aktif dalam menghadapi kondisi lingkungan sekitar yang terus mengalami perubahan, sehingga *smart people* yang terorganisasi dan terstruktur memiliki inovasi dan kreativitas sebagai bentuk penyatuan ide. Cara masyarakat Kota Batu berpartisipasi dalam kebijakan *smart city* bermacam-macam tindakan seperti memanfaatkan fasilitas, menyumbang ide melalui diskusi kelompok sosial masyarakat, dan memberi tenaga atau materi seperti ikut terlibat dalam program atau kegiatan yang ada dalam lingkungan masyarakat. Sebenarnya partisipasi yang paling esensial dalam suatu pembangunan adalah mengambil bagian atau peran dalam pembangunan mulai dari menyampaikan sesuatu saat ikut kegiatan, memberi saran berupa ide, jasa, waktu, keterampilan, modal, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil dari pembangunan seperti *smart city*.

Banyak masyarakat Kota Batu yang menggunakan produk *smart city* dan partisipasi yang paling banyak dalam penggunaan teknologi adalah Among Tani dan Among Kota karena sesuai dengan potensi pertanian dan pariwisata yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Teknologi diciptakan untuk memudahkan aktivitas manusia, dengan adanya *smart city* yang diterapkan di Kota Batu dapat memudahkan aktivitas pemerintah dalam melakukan pelayanan pada masyarakat. Menurut Bahua (2018) masyarakat dalam pembangunan berhasil atau tidaknya dapat dilihat dari peran masyarakat dan peran pemerintah sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan. Dengan adanya teknologi sebagai pembangunan menjelaskan dimana peran pemerintah semakin defisit atau berkurang karena sebagian diambil alih oleh teknologi sebagai jalan alternatif bagi masyarakat melalui hasil-hasil pembangunan, sehingga hal tersebut harus dikembangkan oleh pemerintah dalam mereduksi apa yang menjadi utama dalam pembangunan masyarakat.

Pemkot Batu dengan inovasi dan kemajuan teknologi yang sangat membantu kinerja pemerintah dalam mewujudkan *good governance* cukup efektif karena muncul kesadaran dari masyarakat khususnya petani dalam menggunakan Among Tani dan akun media sosial lainnya untuk memperoleh informasi dengan cara aktif menggunakan gawai dan banyak masyarakat yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani. Dari penjelasan diatas dapat diperkuat oleh Tahir (2014) untuk mewujudkan pemerintah yang akuntabilitas pada publik, penggunaan prinsip transparansi adalah cara yang paling efektif karena penyelenggaraan pemerintah memiliki arti khusus dimana masyarakat diberi kesempatan untuk

mengetahui kebijakan yang akan dan diambil pemerintah. Adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah maka masyarakat akan menerima informasi kebijakan tersebut dan memberikan *feedback* pada kebijakan yang diambil pemerintah.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Analisis Kebijakan *Smart City*

a. Faktor Pendukung

Dalam menganalisis kebijakan *smart city* untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat tidak hanya dinilai dari partisipasi masyarakat menggunakan aplikasi *smart city* dimana Kota Batu memiliki tiga aplikasi andalan yaitu Among Tani, Among Kota, dan Among Warga. Karena *smart city* tidak hanya membahas konteks teknologi maka *smart city* juga membahas bagaimana sumber daya yang ada mampu dikelola dengan baik secara efektif dan efisien untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan melalui pengelolaan dan pengembangan kota. Oleh karena itu, yang menjadi faktor pendukung adanya partisipasi masyarakat pada Among Tani yang digunakan petani adalah kesadaran masyarakat akan masalah yang dialami sehingga partisipasinya pada aplikasi Among Tani semakin meningkat dalam memasarkan produk hasil pertanian untuk memperoleh keuntungan. Hal inilah sebagai alasan pemerintah menciptakan Among Tani khusus petani supaya para petani tidak lagi menjual hasil pertanian pada para tengkulak dengan harga murah.

Adanya *smart city* Kota Batu untuk mengatasi masalah pertanian karena sebagian besar masyarakat berasal dari petani, hal tersebut yang menjadi tugas utama pemerintah agar petani bisa sejahtera. Semua pihak yang memiliki kepentingan di sektor pertanian dipertemukan dalam among tani untuk berbagi informasi, data, dan sebagai media pembelajaran bagi petani. Petani yang memiliki masalah pertanian atau ingin konsultasi langsung dengan ahli tani, keluhannya dilaporkan melalui menu keluhan dan menu-menu lainnya sesuai tujuan laporan.

Menurut Gunawan (2016) mendefinisikan sumber daya manusia adalah aset sekaligus modal yang paling penting dalam melakukan kegiatan hidup setiap individu. Sumber daya manusia sebagai obyek dan subyek pembangunan karena dalam diri setiap individu memiliki kemampuan untuk dimanfaatkan dengan baik demi kepentingan kelompok maupun diri sendiri. Kualitas SDM pada petani semakin meningkat semenjak *smart city* diterapkan, karena banyak pelayanan berbasis jaringan yang dilakukan oleh pemerintah melalui pemberdayaan masyarakat seperti adanya kelompok tani sehingga secara tidak langsung *mindset* masyarakat akan pentingnya menggunakan internet, dengan sendirinya merasa senang jika pelayanan yang dibutuhkan terbilang cepat dan murah. Partisipasi petani juga semakin meningkat karena bergabungnya setiap individu dalam kelompok tani dan kelompok sosial lainnya yang semakin terlembaga dan terorganisir. Di setiap desa juga terdapat tim penyuluh tani yang nantinya berperan sebagai pemberi informasi kebijakan pada petani yang sekaligus mensosialisasikan *smart city* dan memberi pelatihan cara penggunaan aplikasi.

Sarana dan prasarana teknologi penunjang *smart city* juga menjadi faktor pendukung sebagai perantara yang membuat kedekatan masyarakat dengan pemerintah dalam melakukan pelayanan publik yang berbasis online. Bentuk akuntabilitas Pemerintah Kota Batu juga semakin terstruktur dan terarah dalam kelembagaannya seperti adanya *website* bahwa semua laporan akuntabilitas pemerintah di *upload* ke *website* pada menu SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah) dan semua organisasi perangkat daerah sudah saling terkoneksi dalam *website* untuk saling bertukar informasi dan data yang terintegrasi.

b. Faktor Penghambat

Pada faktor penghambat dalam kebijakan *smart city* sehingga partisipasi masyarakat berkurang terdapat dua faktor yaitu faktor internal peran masyarakat itu sendiri dan faktor eksternal diluar peran masyarakat kota Batu. Faktor internal peran masyarakat dalam mengisi pembangunan sehingga partisipasi menjadi terhambat adalah di bidang pertanian minat masyarakat petani menjadi menurun karena usaha sebagai petani tidak menjanjikan sehingga banyak masyarakat yang melakukan alih fungsi lahan menjadi bangunan dan generasi petani juga semakin menurun karena banyak faktor yang menyebabkan, hal tersebut dapat terjadi seperti kurang sejahteranya hasil tani yang diperoleh, padatnya investasi dan kurangnya perlindungan dari pemerintah. Masih ada warga kota Batu yang belum mengetahui apa itu *smart city* sehingga ruang untuk melakukan *review* atau sejenis memberi saran dan kritik pada pemerintah menjadi terhalang.

Faktor *eksternal* diluar peran masyarakat adalah dalam instansi pemerintah konsep *smart city* yang di implementasikan selama ini masih terfokus pada kemajuan teknologi dan melakukan pelayanan yang berbasis online. Karena kurangnya sosialisasi yang tidak merata maka masyarakat juga akan terhambat dalam berpartisipasi atau memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah, sehingga masyarakat yang berada di pelosok Desa atau diluar dari pusat Kota Batu masih mengalami keterlambatan mendapatkan informasi bahkan tidak bisa memanfaatkan pelayan publik yang berbasis online. Hal tersebut disebabkan karena pembangunan infrastruktur masih terfokus di pusat Kota dan kurang meratanya transparansi pemerintah dalam mengelola informasi terhadap masyarakat yang tidak menggunakan media menjadi terhambat dalam memperoleh informasi sehingga untuk berpartisipasi atau melakukan pelayanan yang berbasis online tidak bisa ia jangkau.

3. Model Analisis Kebijakan *Smart City*

Melalui kebijakan tersebut karena masyarakat Kota Batu sebagian besar berasal dari petani maka *smart city* dirubah namanya menjadi Batu Among Tani Teknologi (BATT) yang memiliki tiga aplikasi khusus yaitu Among Tani, Among Kota, dan Among Warga. Dari ketiga aplikasi tersebut yang paling khusus adalah Among Tani untuk kesejahteraan petani, dan aplikasi penunjang bidang pertanian yang berbasis pariwisata adalah *shining* Batu. Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat Pemerintah Kota Batu membentuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan menyiapkan wadah untuk semua komponen yang berkepentingan di sektor pertanian dipertemukan dalam aplikasi Among Tani.

Untuk petani yang mengembangkan dan mempertahankan pertanian mulai menjarah ke bidang pariwisata menggunakan *shining* Batu. Disisi lain petani juga mengikuti *event*, festival, karnaval dan *fashion* dengan menampilkan atribut atau ornamen pertanian yang bertujuan untuk mempertahankan *image* Kota Batu sebagai kota pertanian. Yang menjadi faktor pendukung adanya partisipasi masyarakat petani adalah kesadaran serta meningkatnya pengetahuan yang diperoleh melalui penggunaan internet dan bergabungnya setiap individu dalam kelompok tani sehingga pengalamannya semakin bertambah. Petani juga telah disiapkan wadah berjualan online untuk menghindari praktek tengkulak dengan cara menggunakan Among Tani, dan berdasarkan pengalaman itu mereka bisa kembangkan berjualan di sosial media.

Yang menjadi faktor penghambat adalah kurang meratanya sosialisasi pemerintah pada setiap kebijakan *smart city* yang diimplementasikan dan juga masih ada masyarakat yang belum mengetahui apa itu *smart city*. Dan dengan adanya promosi potensi yang ada di Kota Batu yaitu sektor pertanian dan pariwisata untuk menarik wisatawan dan investasi mengakibatkan dampak negatif karena lajunya investasi yang mampu mencederai semangat bertani para tani karena banyak lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi non pertanian. Dengan faktor pendukung dan penghambat tersebut, untuk mewujudkan *good governance* sistem Pemerintahan Kota Batu cukup sesuai dengan aspek analisis kebijakan pendekatan proses dimana kebijakan *smart city* telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui Among Tani yang digunakan petani dan bentuk akuntabilitas pemerintah dilakukan menggunakan *website*. Dalam aspek analisis kebijakan pendekatan partisipasi ada peningkatan ketika pemerintah memberdayakan petani melalui kelompok tani dan selamatnya petani dari praktek tengkulak menggunakan Among Tani.

KESIMPULAN

Smart city pada penelitian ini terfokus pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan mewujudkan *smart city* khususnya Among Tani melalui kebijakan dan sekaligus pembangunan yang mampu mengelola dan mengembangkan sektor pertanian dan pariwisata untuk menjadi Kota cerdas. Sebagai Kota pertanian maka Pemerintah Kota Batu menciptakan satu aplikasi khusus petani yaitu Among Tani demi kesejahteraan petani agar hasil pertanian tidak lagi dijual pada para tengkulak dengan harga yang murah.

Kebijakan *smart city* yang ada di Kota Batu telah mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat memanfaatkan layanan teknologi khususnya Among Tani dimana petani sebagai penjual masyarakat umum sebagai pembeli disertai harga produk pertanian sudah tertera, pengalaman berjualan online petani sudah menjarah mengelola dan mengembangkan sektor pertanian berbasis pariwisata atau agrowisata menggunakan *shining* Batu. Partisipasi dalam kegiatan sosial dilakukan melalui kelompok tani. Transparansi kebijakan pemerintah diinformasikan menggunakan Among Tani pada menu forum diskusi dan dibantu oleh tim penyuluh tani kepada gabungan kelompok tani, bentuk sistem dan laporan akuntabilitas anggaran yang digunakan pemerintah dilakukan menggunakan *website* Kota Batu pada menu LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan semua data bisa *download*.

Faktor pendukung kebijakan *smart city* adalah adanya payung hukum yang jelas Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2017 Tentang *Masterplan Smart City*. Partisipasi masyarakat petani di kelompok tani, inisiatif petani berjualan di aplikasi Among Tani. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah semakin banyaknya investasi yang masuk di Kota Batu maka semakin masif juga lahan pertanian yang alih fungsi menjadi bangunan sehingga generasi petani lambat laun akan semakin menurun jumlahnya. Penghambat partisipasi masyarakat lainnya adalah pemerintah masih kurang dalam sosialisasi *smart city* karena tahap sosialisasinya masih belum merata sehingga masih banyak masyarakat di pelosok atau bahkan di perkotaan belum mengetahui apa itu *smart city*. Karena pemerintah mengaungkan kata *smart city* yang berasal dari bahasa inggris, dan pada saat masyarakat diwawancara atau hanya sekedar bertanya pada masyarakat. Masyarakat bahkan belum mengetahui kalau di Kota Batu ada *smart city*.

Terwujudnya prinsip-prinsip *good governance* di Kota Batu dapat dilihat dari adanya pelaksanaan transparan, akuntabilitas dan responsibilitas kinerja pemerintah melalui sarana dan prasarana yang tersedia. Seperti ketersediaan *website* portal resmi Kota Batu dan ketiga aplikasi andalan yaitu Among Kota, Among Tani, dan Among Warga

sebagai bentuk kemampuan sumber daya manusia menciptakan produk *smart city* dalam melakukan pelayanan publik berbasis elektronik atau *e-government*.

DAFTAR RUJUKAN

- Aristovianie, A. H. (2017). Adaptasi Masyarakat Dalam Dimensi Smart People Kasus : Rusunawa Kaligawe Semarang. *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Dalam Pengembangan SmartCity*, 1(1), 151–160. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/smartcity/article/view/1718>
- Azkiya, H. (2018). *Penerapan E-Government Dalam Peningkatan Pelayanan Publik (Studi pada Pelaksanaan Program e-Tax Pajak Restoran di Kota Malang)* [Universitas Airlangga]. <http://repository.unair.ac.id/74502/>
- Bahua, M. I. (2018). *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat*. Ideas Publishing.
- Faidat, N., & Khozin, M. (2018). Analisa Strategi Pengembangan Kota Pintar (Smart City): Studi Kasus Kota Yogyakarta. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 3(2), 171–180. <https://doi.org/10.24905/jip.3.2.2018.171-180>
- Gunawan, C. I. (2016). *Teori Dasar Manajemen Produksi Dan Operasional: Disertai Contoh Penghitungan*. CV. IRDH (Research & Publishing) Anggota IKAPI.
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat* (T. S. Razak (ed.); 1st ed.). De La Macca.
- Insani, P. A. (2017). Mewujudkan Kota Responsif Melalui Smart City. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 25–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/pjiap.v2i1.1423>
- Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 6(1), 1–18. <https://doi.org/10.34010/JIPSI.V6I1.232>
- Menteri Komunikasi dan Informasi RI. (2017). *Panduan Penyusunan Masterplan Smart City: Gerakan Menuju 100 Smart City*.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2), 87–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.26877/civis.v1i2/Juli.591>
- Raffi, F. A., Margareta, F., & Dewanti, S. (2020). Upaya Dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik (Study Kasus Penerapan Konsep Smart City di Kota Batu Berbasis Teknologi). *Prosiding Simposium Nasional "Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Era Revolusi Indusri 4.0"*, 810–820. <https://doi.org/10.22219/PSNIP.Vol0.No0.II|810-820>
- Rejeki, D. S., & Yusup, P. M. (2020). Pengalaman Berwirausaha Berbasis Membaca Online di Kalangan Ibu Rumah Tangga. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9(2), 201–212. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jish-undiksha.v9i2.17731>
- Rohayatin, T. (2017). Strategi Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah : Menuju Era Globalisasi. *Jurnal Transformative*, 3(1), 40–52. <https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/22>
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. ALFABETA, cv.
- Widodo, N. (2016). Pengembangan e-Government di Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Smart City (Studi di Pemerintah Daerah Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 2(4), 58–67. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.04.15>